

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Generasi muda memiliki posisi dan peran yang sangat vital dalam kehidupan kebangsaan Indonesia. Hal ini didasarkan pada peran pemuda seperti yang dimuat dalam UU RI No. 40 tahun 2009 tentang Kepemudaan yang berbunyi pemuda berperan aktif sebagai kekuatan moral, kontrol sosial, dan agen perubahan dalam segala aspek pembangunan nasional. Peran pemuda menjadi salah satu kunci terlahirnya negara Indonesia yang menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan di atas kemajemukan bangsa Indonesia. Hal ini dapat dibuktikan dari beberapa peristiwa sejarah Indonesia yang memberikan gambaran tentang vitalnya peran pemuda yaitu peristiwa sejarah Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 yang menjadi kunci terbentuknya kekuatan pemuda untuk bersatu melawan penjajahan kolonial Belanda. Peristiwa lain diantaranya yaitu perjuangan pemuda pada era orde lama dan akhir orde baru.

Presiden RI pertama, Soekarno, pernah berkata “Berikan aku sepuluh pemuda niscaya akan ku goncangkan dunia” menjadi sebuah pecut bahwa pemuda menjadi kunci utama dalam perjuangan ke arah perbaikan negara Indonesia yang sejatara. Hal ini didasari atas karakteristik pemuda seperti pada UU RI No. 40 tahun 2009 tentang kepemudaan pasal 6 yaitu “memiliki semangat kejuangan, kesukarelaan, tanggung jawab, dan ksatria, serta memiliki sifat kritis, idealis, inovatif, progresif, dinamis, reformis, dan futuristik”.

Pemuda dengan karakteristik seperti demikian menjadikannya memiliki peran penting dalam dinamika sosial Indonesia ditengah arus perubahan sosial yang terus mendera Indonesia. Hal ini mendorong perlunya ada suatu agenda pemberdayaan pemuda sehingga pemuda dengan karakteristik demikian mampu menjalankan perannya sebagai kekuatan moral, kekuatan sosial, dan agen perubahan. Desakan globalisasi menjadi salah satu agenda dari hampir seluruh negara di dunia karena globalisasi memberi dampak yang sangat signifikan terhadap kehidupan negara baik dengan segala aspeknya baik ekonomi, sosial,

politik, hukum, dan lain sebagainya. Dampak positif dan negatif menjadi bonus yang tidak bisa dilepaskan dari globalisasi ini.

Indonesia sebagai negara berkembang sangat terpengaruhi oleh arus globalisasi ini. Sebagai negara berkembang, globalisasi menjadi pendorong untuk meningkatkan taraf hidup kenegaraan. Namun begitu pula dampak negatif globalisasi ini menjadi ujian untuk terus dihadapi dan dicarikan solusinya. Dampak globalisasi ini pula dirasakan sangat berpengaruh besar terhadap generasi muda Indonesia baik itu jika dipandang dari sisi positif maupun negatifnya. Jika dilihat dari sisi positifnya, globalisasi menjadi faktor pendorong untuk menjadikan generasi muda sebagai tonggak pemeran utama dalam menciptakan kemajuan Indonesia. Pesatnya teknologi informasi menjadi sarana bagi generasi muda untuk mampu mengembangkan diri dalam upaya menciptakan generasi muda sebagai pemeran utamanya. Begitu pula kerasnya persaingan dalam era globalisasi ini mendorong pemuda untuk memiliki kompetensi yang mampu membawa generasi muda menjadi kompetitor.

Namun, tidak bisa dilepaskan pula dampak negatif dari globalisasi ini terhadap generasi muda. Menyimpangnya perilaku generasi muda yang cenderung dan bahkan jelas bertentangan dengan budaya dan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. Perilaku seks bebas, narkoba, dan sikap acuh pemuda yang hanya mementingkan nafsu belaka menjadi ancaman tersendiri bagi kelangsungan generasi muda yang disiapkan menjadi penerus perjuangan bangsa Indonesia. Permasalahan selanjutnya terletak pada lunturnya sifat atau karakter kepemimpinan pada generasi muda. Generasi muda sebagai aset untuk persiapan kesejahteraan masa depan dituntut untuk menjadi pemimpin yang mampu menjalankan kehidupan kebangsaan Indonesia yang berdasar pada Pancasila. Namun dalam perjalanan Indonesia saat ini, karakter kepemimpinan menjadi permasalahan yang masih perlu untuk dipecahkan. Nilai-nilai luhur bangsa Indonesia yang tercermin dalam Pancasila menjadi suatu hiasan yang dibingkai dalam kesedihan para pendiri bangsa. Hal tersebut dikarenakan generasi muda telah melupakan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia dan lebih mengagungkan nilai-nilai budaya asing yang berseberangan dengan budaya Indonesia. Nampak jelas fenomena-fenomena perilaku yang menyimpang dari generasi muda yang

mencerminkan luntur dan terkikisnya nilai-nilai luhur bangsa Indonesia yang tercermin dalam Pancasila.

Mengingat intensitas penyimpangan yang terjadi pada generasi muda mendorong kita untuk mencari solusi atas permasalahan tersebut. Tidak hanya terfokus pada dampak negatif yang dihasilkan oleh globalisasi, namun juga dampak positif globalisasi juga menjadi agenda pemikiran kita. Jika kita melihat dampak negatif globalisasi bagi generasi muda jelas nampak bahwa perlu analisis mendalam sehingga kita dapat menciptakan solusi tindakan yang mampu menggiring generasi muda sehingga mampu memerankan perannya sebagai kekuatan moral, kekuatan sosial, dan agen perubahan bagi masyarakat. Jika dilihat dari sudut dampak positif globalisasi, memperingatkan kita untuk mampu membentuk generasi muda yang mampu memerankan perannya sebagai aktor utama globalisasi seperti sebagai kompetitor dalam persaingan yang ketat, mampu memanfaatkan pesatnya arus teknologi informasi, dan mencitakannya sebagai warga negara global.

Salah satu solusi atas fenomena tersebut adalah melalui pendidikan bagi generasi muda. Pendidikan menjadi salah satu kunci dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pendidikan ditujukan sebagai sarana terciptanya bangsa yang memiliki intelektualitas kognisi dan moral perilaku. Hal ini menjadi prinsip bagi setiap negara baik negara terbelakang, berkembang, dan bahkan negara maju sekalipun. Apalagi Indonesia sebagai negara berkembang, pendidikan menjadi kunci utama dalam menciptakan bangsa yang cerdas dalam berpikir dan juga perilaku. Hal ini tidak terlepas dari amanat konstitusi yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa dan pendidikan menjadi sarana realisasi demi tercapai tujuan kehidupan berbangsa dan bernegara tersebut. Oleh karena itu, diselenggarakanlah suatu sistem pendidikan seperti yang tercantum pasal 31 ayat (1) dan (3) UUD NRI 1945 yang menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan dan pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional. Sudah sangat jelas bahwa pemerintah Indonesia harus memprioritaskan jalannya pendidikan di negara Indonesia ini karena pendidikan adalah suatu tuntutan untuk menciptakan warga negara yang baik dan paham akan segala hal yang harus dilakukan untuk menciptakan negara yang sejahtera. Untuk

itu perlu adanya pemahaman tentang pendidikan itu sendiri. Dalam UU RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 Ayat (1) disebutkan bahwa:

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, dan keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.

Berkaitan dengan pentingnya peranan pendidikan bagi bangsa Indonesia, salah satu bagian pendidikan yang harus diselenggarakan bagi bangsa Indonesia adalah pendidikan politik generasi muda. Dasar diperlukannya penyelenggaraan pendidikan politik generasi muda tidak lain adalah ditujukan untuk menumbuhkan dan mempersiapkan generasi muda menjadi seorang pemimpin yang siap berkompetisi dalam dinamika kehidupan nasional bahkan internasional.

Permasalahan yang mendera generasi muda seperti diungkap sebelumnya menjadi latar belakang diperlukannya pendidikan politik bagi warga negara Indonesia. Dalam buku *political education* dari Robert Brownhill dan Patricia Smart, Hajer menyebutkan bahwa pendidikan politik adalah usaha membentuk manusia menjadi partisipan yang bertanggung jawab dalam politik, sehingga masyarakat mengerti tentang hak politiknya” (Sadeli, dkk, 2009, hlm. 19). Sama halnya dengan pendapat Hajer, Kartono (2009, hlm. 64) menyebutkan bahwa:

Pendidikan politik adalah upaya edukatif yang intensional, disengaja dan sistematis untuk membentuk individu sadar politik, dan mampu menjadi pelaku politik yang bertanggung jawab secara etis/moril dalam mencapai tujuan-tujuan politik.

Pendidikan politik memiliki peran penting dalam menciptakan bangsa yang melek politik serta membentuk karakter dan perilaku warga negara. Pendidikan politik berpotensi untuk membentuk karakter, watak, dan tanggung jawab warga negara yang demokratis sehingga dapat mencapai peradaban bangsa yang lebih maju. Peran pendidikan politik menjadi lebih penting karena memiliki peran sebagai alat distribusi nilai kebangsaan bagi generasi muda. Mengingat posisi generasi muda yang sangat vital dalam kehidupan kebangsaan, pendidikan politik sangat diperlukan untuk diselenggarakan. Hal ini didasarkan pada peran pemuda seperti yang dimuat dalam UU No. 40 tahun 2009 tentang kepemudaan

yang berbunyi “pemuda berperan aktif sebagai kekuatan moral, kontrol sosial, dan agen perubahan dalam segala aspek pembangunan nasional”. Peran penting pemuda inilah menjadi alasan utama dalam penyelenggaraan pendidikan politik bagi generasi muda. Pendidikan politik sangatlah penting bagi generasi muda agar dalam kehidupan bernegara bisa menjadi partisipan yang bertanggung jawab, sehingga bisa memahami proses penggunaan kekuasaan dalam menegakan aturan dalam masyarakat dan masyarakat secara umum dapat menggunakan hak politiknya.

Jika dilihat dalam konteks sosial, ekonomi, dan budaya, pendidikan politik tidak melulu tertuju pada arah kecerdasan (intelektual) namun lebih pada kecerdasan moral individu dalam berhubungan dengan individu lain dan masyarakatnya. Hal ini menggambarkan bahwa seseorang yang melek dalam politik atau insan politik akan lebih mudah berbaur dengan masyarakatnya, karena mampu berhubungan dengan penuh tanggung jawab dan sadar akan kedudukannya dalam masyarakat. Selain itu, pendidikan politik menjadi sarana membentuk karakter kepemimpinan pada generasi muda. Hilangnya karakter kepemimpinan menjadi masalah tersendiri pada generasi muda sehingga harus menjadi agenda berikutnya dalam penyelenggaraan pendidikan politik. Dalam suasana Indonesia yang terdiri atas masyarakat majemuk, perlu adanya sosok kepemimpinan antarbudaya pada generasi muda sehingga mampu menjalankan peran kepemimpinan yang demokratis dalam kondisi bangsa Indonesia yang multikultural dan plural. Pendidikan politik pula ditujukan sebagai sarana menciptakan generasi muda yang mampu memerankan posisi politisnya dan mampu menjadi seorang pemimpin yang sesuai dengan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia seperti yang terkandung dalam Pancasila. Pendidikan politik dalam hal ini ditujukan untuk membentuk generasi muda yang mampu menjadi pemimpin demi terciptanya budaya politik Pancasila.

Kantaprawira (1984, hlm. 29) memberikan definisi budaya politik tidak lain adalah pola tingkah laku individu dan orientasinya terhadap kehidupan politik yang dihayati oleh anggota sistem politiknya. Dalam kacamata Indonesia, Pancasila sebagai ideologi sekaligus sumber utama kehidupan mengilhami terciptanya suasana dan sistem politik yang berasaskan pada nilai-nilai Pancasila.

Hal ini mendorong untuk terciptanya budaya politik Pancasila dalam dinamika politik Indonesia. Hal tersebut mengilhami kita agar pendidikan politik Indonesia ditujukan untuk menciptakan generasi muda yang mampu menjalankan peran dan posisi politisnya dalam suasana budaya politik Pancasila sehingga terciptanya iklim demokrasi yang menuntut partisipasi warga negara yang bernafaskan Pancasila.

Salah satu sarana penyelenggaraan pendidikan politik tersebut adalah melalui organisasi kepemudaan sebagai langkah pemberdayaan generasi muda. Ada banyak organisasi kepemudaan yang menyelenggarakan pendidikan politik tersebut diantaranya adalah Gerakan Pemuda Ansor. GP Ansor merupakan organisasi kepemudaan Islam yang merupakan afiliasi dengan Nahdhatul Ulama yang berkomitmen terhadap sistem kenegaraan yang berpegang teguh terhadap Pancasila. GP Ansor sebagai organisasi kepemudaan Islam dan berkomitmen terhadap Pancasila dirasa sangat tepat untuk melakukan penelitian ini dalam membentuk karakter kepemimpinan lintas budaya pada generasi muda karena sebagai organisasi Islam maka dituntut untuk merealisasikan visi Islam yaitu *rahmatan lil 'alamin* (rahmat bagi seluruh alam) salah satunya membentuk pemimpin lintas budaya ini.

Penyelenggaraan pendidikan politik dalam organisasi kepemudaan merupakan salah satu cara yang harus dilakukan dalam dinamika politik Indonesia terlebih ditujukan kepada para generasi muda demi menyongsong masa depan politik Indonesia. Windari (2013, hlm. 10-11) berpendapat:

Sikap kritis, idealis, inovatif, solider, dan semangat juang tinggi merupakan potensi yang dimiliki pemuda. Sehingga dengan adanya organisasi pemuda, sikap positif ini akan mendorong kegiatan positif untuk nantinya akan mampu menciptakan generasi penerus bangsa yang memegang jabatan tinggi menggantikan pemimpin lama ataupun seniornya.

Hal ini memberikan penekanan bahwa organisasi kepemudaan memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk dan mengembangkan potensi generasi muda terlebih dalam pemahaman politik generasi muda melalui pendidikan politik. Terlebih, berkaca dari realita yang terjadi tentang masalah-masalah yang mendera generasi muda menjadikan bomerang bagi bangsa Indonesia. Hal ini mengharuskan dilaksanakannya pendidikan kebangsaan

Indonesia yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Hal ini pula memberi sumbangsih besar terhadap penyelenggaraan pendidikan politik yang berdasar pada nilai-nilai Pancasila sehingga mampu membentuk karakter Pancasila bagi para generasi muda.

Pendidikan politik sebagai elemen pendidikan dalam membentuk karakter bangsa Indonesia sangat memiliki kaitan erat dengan Pendidikan Kewarganegaraan. PKn pada dasarnya terdiri atas tiga ranah yaitu politik, hukum, dan nilai moral. Adapun PKn memiliki tujuan untuk menciptakan warga negara yang baik dan cerdas (*to be good and smart citizen*). Terkait dengan tujuan PKn tersebut, warga negara baik dan cerdas terletak pada aspek intelektualitas dan perilaku. PKn yang terdiri atas tiga ranah di atas, menuntut untuk menciptakan warga negara yang cerdas dalam lingkungan kehidupan politik dan hukum. Hal ini menuntut adanya pembentukan pemahaman dan perilaku warga negara melalui pendidikan diantaranya pendidikan politik dan pendidikan hukum.

Berdasarkan hal tersebut, peneliti terdorong untuk meneliti proses pendidikan politik yang diselenggarakan organisasi kepemudaan GP Ansor yang dianggap memiliki peran besar dalam kehidupan perpolitikan Indonesia dan menciptakan generasi muda yang memiliki tanggung jawab dan berpegang teguh pada nilai-nilai luhur kebangsaan Indonesia. Hal inilah yang menarik untuk dijadikan sebuah penelitian yang berjudul **“Implementasi Pendidikan Politik dalam Membentuk Karakter Kepemimpinan Lintas Budaya pada Generasi Muda demi Mewujudkan Budaya Politik Pancasila”** dengan melakukan penelitian terhadap organisasi kepemudaan Gerakan Pemuda Ansor Jawa Barat.

## **B. Identifikasi Masalah**

Pergeseran nilai-nilai karakter dan semangat kepemudaan melanda generasi muda Indonesia. Kontras rasanya jika kita lihat peran pemuda pada era prakemerdekaan, pascakemerdekaan, dan era reformasi yang sangat mengelora sehingga mampu mempengaruhi dinamika kehidupan kenegaraan Indonesia jika dibandingkan dengan peran pemuda pada era sekarang ini. Maka permasalahan yang dihadapi Indonesia terkait dengan generasi muda yang meliputi:

- 1) Terjadinya degradasi moral generasi muda yang jauh akan nilai-nilai Pancasila.

- 2) Lunturnya karakter kepemimpinan lintas budaya pada generasi muda yang berasaskan pada nilai-nilai Pancasila.
- 3) Lunturnya pemahaman politik generasi muda tentang budaya politik Pancasila.
- 4) Lunturnya partisipasi generasi muda dalam kehidupan kenegaraan Indonesia.

### **C. Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

- 1) Bagaimana cara pandang organisasi kepemudaan GP Ansor Jawa Barat dalam memaknai pendidikan politik, kepemimpinan lintas budaya, dan budaya politik Pancasila?
- 2) Bagaimana peran organisasi kepemudaan GP Ansor Jawa Barat dalam membentuk karakter kepemimpinan lintas budaya pada generasi muda yang berasaskan pada nilai-nilai Pancasila melalui penyelenggaraan pendidikan politik?
- 3) Bagaimana metode pembelajaran politik di GP Ansor Jawa Barat dalam membentuk karakter kepemimpinan lintas budaya dalam mewujudkan budaya politik Pancasila?
- 4) Apa kendala yang dihadapi dalam penyelenggaraan pendidikan politik generasi muda di GP Ansor Jawa Barat?
- 5) Bagaimana upaya untuk mengatasi kendala dalam penyelenggaraan pendidikan politik generasi muda di GP Ansor Jawa Barat?

### **D. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan pokok dari penelitian ini yaitu :

- 1) Untuk mengetahui cara pandang organisasi kepemudaan GP Ansor Jawa Barat dalam memaknai pendidikan politik, kepemimpinan lintas budaya, dan budaya politik Pancasila.
- 2) Untuk mengetahui peran organisasi kepemudaan GP Ansor Jawa Barat dalam membentuk karakter kepemimpinan lintas budaya pada generasi muda yang berasaskan pada nilai-nilai Pancasila melalui penyelenggaraan pendidikan politik.



- 3) Untuk mengetahui metode pembelajaran politik di GP Ansor Jawa Barat dalam membentuk karakter kepemimpinan lintas budaya dalam mewujudkan budaya politik Pancasila.
- 4) Untuk mengetahui upaya untuk mengatasi kendala dalam penyelenggaraan pendidikan politik generasi muda di GP Ansor Jawa Barat.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini antara lain sebagai berikut.

##### **1. Manfaat Teoretis**

Penelitian ini bermanfaat bagi perkembangan bidang ilmu politik, khususnya mengenai pendidikan politik generasi muda sehingga dapat memberikan masukan keilmuan dalam pengembangan khazanah keilmuan dalam bidang Pendidikan Kewarganegaran khususnya domain politik.

##### **2. Manfaat Praktis**

###### **a. Bagi mahasiswa**

- 1) Mahasiswa dapat mengetahui tentang manfaat pendidikan politik generasi muda dalam kehidupan bernegara.
- 2) Mahasiswa dapat mengetahui pentingnya aplikasi pendidikan politik generasi muda dalam kehidupan kenegaraan Indonesia.

###### **b. Bagi lembaga**

- 1) Penelitian ini dijadikan sebagai bahan kajian bagaimana pentingnya pendidikan politik bagi mahasiswa.
- 2) Penelitian ini dijadikan sebagai bahan kajian dalam menentukan kebijakan terhadap pengembangan keilmuan program studi.

###### **c. Bagi masyarakat**

Masyarakat dapat memahami pentingnya partisipasi politik masyarakat dalam kehidupan di negara demokrasi seperti Indonesia dengan mengembangkan pemahaman politik para generasi muda melalui pendidikan politik.

#### **F. Penjelasan Konsep**

Dalam penelitian ini terdapat berbagai konsep yang menjadi fokus kajian. Adapun konsep-konsep utama dalam penelitian ini meliputi:

## 1. Pendidikan politik

Pendidikan politik merupakan salah satu elemen penting pendidikan yang harus diterima oleh masyarakat. Hal ini dikarenakan pendidikan politik merupakan salah satu jalan untuk membentuk warga negara yang mampu berpartisipasi dalam kehidupan kenegaraannya dan menentukan sikap dalam melaksanakan partisipasi tersebut demi terwujudnya dinamika positif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Seorang ahli yaitu Hajer dalam buku *political education* dari Robert Brownhill dan Patricia Smart dalam Sadeli, dkk (2009, hlm. 19) mengatakan bahwa pendidikan politik adalah usaha membentuk manusia menjadi partisipan yang bertanggung jawab dalam politik, sehingga masyarakat mengerti tentang hak politiknya. Senada dengan pendapat Hajer, Kartono (2009, hlm. 64) menyebutkan bahwa:

Pendidikan politik adalah upaya edukatif yang intensional, disengaja dan sistematis untuk membentuk individu sadar politik, dan mampu menjadi pelaku politik yang bertanggung jawab secara etis/moril dalam mencapai tujuan-tujuan politik.

Pelaksanaan pendidikan politik tersebut, perlu adanya suatu acuan yang kemudian dikenal dengan kurikulum pendidikan politik. Brownhill dan Smart (1989, hlm. 104) berpendapat

*we shall use Stradling's proposals for such a curriculum as a checklist for deciding on priorities. He examines the contents of the political curriculum by dividing into three sections: knowledge, skills, and attitudes and procedurak values. He further divides knowledge into propositional knowledge, and practical knowledge and understanding: skills into intelectual skills, acion skills, and communication skills.*

Selanjutnya, Brownhill dan Smart (1989, hlm. 110-111) menyebutkan kurikulum pendidikan politik yaitu sebagai berikut.

- a. *An ethical based should be developed, which would include respect for others, tolerance, and an understanding of the principle of treating others as one would like to be treated oneself..*
- b. *A consideration of how rules can be changed, and generally of how to get things done.*
- c. *Nature of rules and authority.*
- d. *Concept of obligation to legitimate authority.*
- e. *An understanding of some basic political concepts, e.g. freedom, equality, justice, the rule of law, and some of the arguments related o these concepts.*

- f. *An understanding of the basic structure of central and local government.*
- g. *Some understanding of the working of the national and international economy.*
- h. *Some knowledge of recent British and international history.*
- i. *Self-analysis.*

Pernyataan tersebut memperkuat bahwa perlunya suatu kurikulum pendidikan politik adalah sebagai acuan atau dasar pelaksanaan pendidikan politik agar tujuan dilaksanakannya pendidikan politik ini dapat tercapai dengan lebih efektif. Harapan yang sangat besar apabila, pendidikan politik dapat terlaksana mengikuti kurikulum pendidikan politik yang telah ditentukan, sehingga akan lahir insan politik yang diistilahkan *stradling* sebagai manusia melek politik, yang memiliki pemahaman tentang politik dan mampu melakukan tindakan politik yang didasari nilai-nilai dan etika politik. Manusia seperti ini yang disebut oleh banyak orang sebagai *negarawan* yang dapat menjalankan negara sehingga tercapainya tujuan negara.

Adapun bentuk-bentuk dari pendidikan politik tersebut menurut Kuntowijoyo (Kosasih, 2011, hlm. 45) menyebutkan bentuk-bentuk pendidikan politik yaitu sebagai berikut.

Pendidikan formal yaitu pendidikan politik yang diselenggarakan melalui indoktriasi. Berikutnya adalah pendidikan politik yang diselenggarakan tidak melalui pendidikan formal, seperti pertukaran pemikiran melalui mimbar bebas, sedangkan pendidikan politik yang baik adalah pendidikan politik yang memobilisasi simbol-simbol nasional, seperti sejarah, seni, sastra, dan budaya.

Berdasarkan pernyataan tersebut, pendidikan politik dalam bentuk pendidikan formal dimaksudkan sebagai pendidikan persekolahan dan partai politik. Indoktrinasi dalam bentuk pendidikan ini, yaitu agar sesuai dan sejalan dengan tujuan penyelenggaraan pendidikan politik tersebut. Dalam dunia persekolahan, indoktrinasi tersebut dimaksudkan agar sejalan dengan tujuan dari pembelajaran tersebut. Lebih jelas lagi apabila pendidikan politik terjadi dalam suatu partai politik, indoktrinasi ditujukan untuk pemahaman kader demi kepentingan partai tersebut.

Adapun dalam penyelenggaraannya, Djiwandono (Kosasih, 2011, hlm. 45-46) menyebutkan jalan yang ditempuh dalam pelaksanaan pendidikan politik yaitu sebagai berikut.

- a. Melalui pendidikan formal meskipun tidak menggunakan istilah pendidikan secara eksplisit.
- b. Melalui pendidikan nonformal, yaitu melalui organisasi kemasyarakatan.
- c. Melalui pendidikan masyarakat dan dalam hubungan ini peranan media massa, baik cetak maupun elektronik tentu sangat membantu.

## 2. Kepemimpinan Lintas Budaya

Kepemimpinan merupakan keterampilan seseorang dalam mempengaruhi orang lain sehingga dapat bertindak sesuai dengan koridor yang telah ditentukan bersama. Kepemimpinan (*leadership*) menjadi kunci utama dalam sebuah budaya organisasi. Sosok pemimpin merupakan sosok yang diharapkan mampu menjadi pengatur dinamika organisasi yang terdiri atas anggota yang memiliki karakter yang berbeda-beda. Seorang pemimpin wajib memiliki karakter kepemimpinan agar mampu menjalankan perannya dalam suatu organisasi baik dalam arti sempit maupun arti luas.

Terdapat beberapa teori tentang kepemimpinan seperti diantaranya *Behavioral Theory* dari Skinner (1967) Bandura (1982) (dalam Anwarudin, 2013) sebagai berikut.

Sesuai prinsip *behaviorism*, seorang pemimpin besar bisa dibentuk tidak selalu karena dilahirkan atau dimitoskan. Kepemimpinan tergantung pada tindakan, bukan pada kualitas mental atau kondisi internal. Setiap orang dapat memiliki jiwa kepemimpinan melalui cara pembelajaran, observasi, dan karena pengalaman.

Berdasarkan teori tersebut dijelaskan bahwa karakter kepemimpinan bukan hanya suatu yang diturunkan secara genetis namun juga merupakan hasil pembelajaran. Pengalaman yang dilakukan seseorang sangatlah memberi pengaruh terhadap karakter kepemimpinan.

Adapun teori yang mendasari kepemimpinan lintas budaya adalah Teori Situasional yang dikembangkan oleh Paul Hersey dan Ken Blanchard. Siagian (2010, hlm. 139) mengatakan bahwa inti teori ini menekankan pada efektivitas kepemimpinan seseorang tergantung pada dua hal, yaitu pemilihan gaya kepemimpinan yang tepat dalam menghadapi situasi tertentu dan tingkat

kedewasaan bawahan yang dipimpin. Selanjutnya mengenai teori situasional ini, Rivai dan Mulyadi (2013, hlm. 9) menekankan bahwa pemimpin memahami perilakunya, sifat-sifat bawahannya, dan situasi sebelum menggunakan suatu gaya kepemimpinan tertentu.

Teori Kepemimpinan Situasional tersebut menjadi landasan utama bagi karakter kepemimpinan lintas budaya. Pemimpin lintas budaya yang dihadapkan pada situasi budaya yang beraneka ragam harus mampu menganalisis budaya yang hidup dalam organisasinya sehingga dia mampu menerapkan gaya kepemimpinan yang tepat sesuai dengan budaya-budaya tersebut. Begitupun dalam konteks negara Indonesia dengan kondisi masyarakat yang majemuk, seorang pemimpin harus mampu menggunakan gaya kepemimpinan yang mampu mengakomodasi perbedaan budaya tersebut sehingga mampu membawa masyarakat Indonesia mencapai tujuan kebangsaannya. Hal inilah yang menjadi kunci utama diperlukannya pemimpin lintas budaya yang mampu memahami perilakunya, karakter rakyat Indonesia, dan gaya kepemimpinan yang tepat dengan situasi Indonesia yang majemuk.

Hampir senada dengan teori situasional, terdapat teori yang menjadi mendukung diperlukannya model kepemimpinan tersebut yaitu *Contingency Theory* dari Joan Woodward (Fiedler dalam Anwarudin, 2013) yang menyebutkan:

Kepemimpinan dipengaruhi oleh variabel-variabel lingkungan yang menentukan gaya kepemimpinan. Tidak ada gaya kepemimpinan yang terbaik dalam semua situasi. Keberhasilan pemimpin tergantung pada sejumlah variabel, termasuk gaya kepemimpinan, kualitas para pengikut, dan aspek lingkungan.

Pada dasarnya, organisasi merupakan sekumpulan unsur yang saling berkaitan dan saling mempengaruhi demi tercapainya tujuan yang telah ditentukan bersama. Peran pemimpin dirasakan sangat penting sebagai sosok yang mampu mengatur dinamika sistem dalam organisasi tersebut. Hal ini mendorong diperlukan adanya sosok pemimpin yang memiliki karakter kepemimpinan sesuai dengan sistem nilai organisasi tersebut.

Indonesia sebagai suatu organisasi dituntut memiliki pemimpin yang mampu menjadi sosok berpengaruh dalam membawa Indonesia ke arah

kesejahteraan. Melihat pada realitas sosial bangsa Indonesia yang terdiri atas keberagaman budaya dan karakter kedaerahan, menuntut adanya sosok pemimpin yang memiliki karakter kepemimpinan antarbudaya sehingga mampu menciptakan suasana keberagaman bangsa menjadi suatu khasanah kekayaan bangsa yang mampu membawa ke arah kehidupan Indonesia yang adil dan beradab. Pemimpin yang memiliki karakter kepemimpinan antarbudaya dituntut memiliki kecerdasan tentang budaya yang hidup di Indonesia. Wibowo (2011, hlm. 347-348) mengatakan kepemimpinan dan budaya sangat berhubungan seperti ditunjukkan bagaimana pemimpin menciptakan, menanamkan, mengembangkan, dan kadang-kadang dengan sengaja berusaha mengubah asumsi budaya.

Berbicara kepemimpinan dalam ajaran islam, islam memiliki visi *rahmatul lil alamin* yang menuntut terciptanya seorang pemimpin yang mampu mengaplikasikan visi tersebut dalam kehidupan kebangsaan Indonesia sehingga mendorong untuk dibentuknya seorang karakter pemimpin lintas budaya terlebih melihat kondisi Indonesia yang dibentuk oleh budaya yang beraneka ragam. Akiga dan Lowe (2004, hlm. 2) mengatakan kepemimpinan lintas budaya diartikan sebagai kemampuan seorang pemimpin untuk mempengaruhi dan memotivasi anggota kelompok budaya yang berbeda penilaian terhadap pencapaian hasil dengan merujuk pada berbagi pengetahuan dan makna sistem dari kelompok budaya yang berbeda. Selanjutnya Akiga dan Lowe (2004, hlm. 2) menungkapkan hal yang membedakan kepemimpinan lintas budaya dengan kepemimpinan tradisional terletak pada perbedaan budaya yang dihadapi, serta mempertimbangkan perbedaan budaya yang ada dalam proses kepemimpinan. Kepemimpinan lintas budaya dalam konteks ke-Indonesia-an memiliki dua tujuan, yaitu *pertama* menjadi *win win solution* terhadap konflik horizontal yang sering terjadi dalam dinamika sosial budaya Indonesia sehingga mampu mengambil sikap positif dan memanfaatkan konflik tersebut ke arah yang positif dan *kedua* menjaga kelestarian budaya Indonesia yang terus mengalami pengikisan akibat dari perubahan sosial yang terus menimpa. Melalui organisasi kepemudaan, diharapkan agar mampu membentuk generasi muda yang memiliki karakter kepemimpinan antarbudaya yang disiapkan untuk memimpin Indonesia yang berdiri di atas keberagaman budaya bangsa. Dalam menjalankan gaya

kepemimpinan lintas budaya perlu memegang prinsip-prinsip kepemimpinan seperti diungkap Jerome Want (Wibowo, 2011, hlm. 323-326) yang menyebutkan prinsip-prinsip kepemimpinan yang benar sebagai berikut.

- 1) Pengambilan keputusan harus dilakukan di tingkat yang paling efektif.
- 2) Kepemimpinan bukan hanya satu orang di puncak, tetapi kepemimpinan terdapat di semua tingkat.
- 3) Komunikasi di dalam organisasi dilakukan dengan dialog terbuka.
- 4) Pemimpin menghargai perbedaan antara atasan dan bawahan atau di antara bawahan serta dapat menemukan peluang dalam konflik.
- 5) Organisasi yang kuat menggantungkan diri pada individu yang kuat dan mempunyai pribadi unggul.
- 6) Keberhasilan dalam bisnis akan memberikan kekuatan finansial.
- 7) Pemimpin melaksanakan pembelajaran berkelanjutan untuk sekarang dan masa datang.
- 8) Merupakan tempat bekerja di mana kita dapat membuat perbedaan.
- 9) Pemimpin memelihara etika.
- 10) Kemitraan diperlukan untuk mencapai sukses bagi semua.
- 11) Seorang pemimpin diharapkan mau bekerja keras untuk mencapai tujuan.
- 12) Pemimpin merencanakan dan melakukan pengukuran untuk memahami dan memperbaiki hasil yang dicapai.
- 13) Pemimpin merasakan kepemilikan bersama dengan berpikir dan bertindak seperti pemilik.
- 14) Keberlanjutan merupakan jalan menuju masa depan.
- 15) Tindakan seorang pemimpin diharapkan memberikan manfaat kepada dunia dengan menciptakan perubahan positif.

### **3. Budaya Politik Pancasila**

Budaya politik merupakan pola perilaku masyarakat dalam berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang berlandaskan pada sistem nilai yang dianut oleh masyarakat tersebut. Kantaprawira (1984, hlm. 29) memberikan definisi budaya politik tidak lain adalah pola tingkah laku individu dan orientasinya terhadap kehidupan politik yang dihayati oleh anggota sistem politiknya. Pancasila sebagai ideologi sekaligus sumber utama kehidupan mengilhami terciptanya suasana dan sistem politik yang berasaskan pada nilai-nilai Pancasila. Hal ini mendorong untuk terciptanya perilaku politik individu Indonesia yang berdasar pada nilai-nilai Pancasila dalam dinamika politik Indonesia.

Berbicara budaya politik tidak bisa terlepas dari perilaku politik, namun keduanya memiliki pengertian masing-masing yang berbeda. Kuswandi (2010, hlm. 40) menyebutkan:

Perilaku politik lebih mengarah pada tindakan-tindakan yang disebabkan cara pandang individu atas sistem politik yang dilaksanakan dalam aktivitas berpolitik dia. Sedangkan budaya politik lebih berkonotasi pada pelembagaan dari perilaku politik warga negara yang telah menyatu dalam aktivitas sosial dan politik” .

Berdasarkan ungkapan tersebut membuktikan bahwa budaya politik merupakan sekumpulan perilaku politik warga negara yang telah disatukan oleh suatu sistem politik masyarakat tersebut. Berbicara tentang budaya politik Indonesia pada dasarnya terjadi keberagaman pada setiap daerah. Hal ini karena beragamnya budaya bangsa Indonesia pada setiap daerah yang memungkinkan terjadi budaya politik yang berbeda pada setiap daerah yang sesuai dengan sistem adat daerah tersebut.

Ada suatu keunikan berkaitan dengan budaya politik Indonesia. Beragamnya budaya yang dimiliki Indonesia menciptakan setiap daerah memiliki budaya politik masing-masing. Namun jika berbicara Indonesia secara keseluruhan, budaya politik Indonesia menjadi satu yaitu budaya politik Pancasila. Pancasila sebagai kausa materialis dari keseluruhan budaya-budaya luhur bangsa Indonesia merupakan alat perekat keberagaman sehingga tercipta persatuan. Hal inilah menjadi dasar diperlukannya suatu sistem politik Indonesia yang berasaskan pada nilai-nilai Pancasila. Pancasila menjadi landasan utama perilaku bangsa Indonesia dalam segala aspek kehidupan kenegaraan, termasuk politik. Sehingga, perilaku politik kenegaraan di Indonesia harus berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila sehingga dapat disatukan oleh suatu sistem nilai yang melahirkan budaya politik Pancasila.

Kantaprawira (1985, hlm. 34) mengklasifikasikan budaya politik sebagai berikut.

- 1) Budaya politik parokial (*parochial political culture*)
- 2) Budaya politik kaula (*subject political culture*)
- 3) Budaya politik partisipan (*participant political culture*)

Budaya politik parokial biasanya ditemukan pada masyarakat-masyarakat tertentu di Indonesia seperti di antaranya masyarakat pedalaman. Budaya politik parokial terbatas pada wilayah atau lingkup kecil. Budaya politik kaula menurut Kantaprawira (1985, hlm. 37) yaitu di mana anggota masyarakat mempunyai minat, perhatian, mungkin pula kesadaran, terhadap sistem sebagai keseluruhan,



terutama terhadap segi outputnya sedangkan perhatian atas aspek input ... dikatakan nol. Sedangkan budaya politik partisipan merupakan bentuk yang sebaliknya dari budaya politik kaula dimana perilaku politik lebih didasarkan pada kesadaran sebagai anggota aktif dalam kehidupan politik.

#### **4. Gerakan Pemuda Ansor**

Merupakan gerakan atau organisasi kepemudaan yang berafiliasi dengan Nahdlatul Ulama (NU) yang merupakan salah satu organisasi keislaman di Indonesia. Lahirnya GP Ansor tidak bisa dilepaskan dari sejarah panjang kelahiran dan gerakan NU di masa prakemerdekaan dan memiliki peran penting dalam catatan sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia. Dalam perjalanannya, GP Ansor memiliki peran strategis dan signifikan dalam mendorong percepatan mobilitas sosial, politik dan kebudayaan. GP Ansor menempati posisi dan peran yang strategis dalam setiap pergantian kepemimpinan nasional.

### **G. Metode dan Teknik Penelitian**

#### **1. Pendekatan dan Metode**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Peneliti mengambil pendekatan ini berdasarkan pada permasalahan yang diteliti, yaitu peneliti ingin mengetahui bagaimana proses pendidikan yang diajarkan dalam syariat Islam, sehingga melalui pendekatan kualitatif peneliti dapat mengkaji dan memperoleh gambaran yang mendalam.

Metode penelitian ini adalah metode deskriptif. Dimaksudkan untuk menggambarkan proses pendidikan politik yang disyariatkan agama Islam. Dalam penelitian ini, peneliti menekankan untuk mengetahui gambaran dari permasalahan yang terjadi secara mendalam, tidak dituangkan dalam bentuk bilangan dan angka statistik.

#### **2. Teknik Pengumpulan Data**

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian yang dilakukan peneliti meliputi wawancara, observasi, studi dokumen, dan studi literatur.

##### **a. Wawancara**

Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu (Esterberg dalam Sugiyono, 2010, hlm. 231). Peneliti melakukan

wawancara ini dengan tujuan untuk mengetahui hal-hal dari responden secara mendalam. Pada dasarnya wawancara ini dilakukan untuk memperoleh informasi dari responden (informan) secara langsung.

Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan wawancara semiberstruktur. Hal ini dilakukan agar responden lebih terbuka terhadap permasalahan, karena responden lebih banyak dimintai informasi yang sifatnya pendapat.

#### **b. Studi dokumen**

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen ini bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental (Sugiyono, 2010, hlm. 240). Dalam penelitian ini, studi dokumen dapat memberi dukungan terhadap data dari hasil wawancara dan observasi sehingga data akan lebih terpercaya.

#### **c. Studi literatur**

Studi literatur ini yaitu dengan mempelajari buku-buku atau bahan-bahan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Dalam penelitian ini, peneliti membaca dan mempelajari buku-buku atau sumber-sumber yang berhubungan dengan pendidikan politik dan pondok pesantren. Studi literatur ini dimaksudkan untuk memperoleh data teoretis sehingga dapat memperkuat data yang diperoleh dalam penelitian ini.

### **3. Teknik Pengolahan dan Analisis Data**

Setelah mengadakan wawancara, observasi, studi dokumen, dan studi literatur, langkah lain yang juga penting dalam penelitian ini adalah pengolahan dan analisis data. Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang telah diperoleh dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesis, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain (Sugiyono, 2010, hlm. 244)

Miles dan Huberman (Sugiyono, 2010, hlm. 246), mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung

secara terus menerus sampai tuntas. Aktivitas dalam analisis data, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dan verifikasi.

a. *Data Reduction* (reduksi data)

Data yang ditemukan di lapangan akan semakin banyak, rumit dan kompleks. Untuk itu, data tersebut perlu dicatat secara teliti dan rinci. Sebagai langkah selanjutnya yaitu analisis data melalui reduksi data. Reduksi data ini berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian, data yang telah direduksi akan memberi gambaran yang lebih jelas dan akan mempermudah peneliti melakukan pengumpulan data selanjutnya.

b. *Data Display* (penyajian data)

Setelah reduksi data, langkah selanjutnya yaitu penyajian data. Penyajian data ini dapat dilakukan dalam bentuk tabel, grafik, piktogram, dan sejenisnya. Melalui penyajian data ini, maka data terorganisasi, tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan semakin mudah dipahami. Dengan penyajian data ini akan memudahkan memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.

c. *Conclusion drawing / verification* (penarikan kesimpulan dan verifikasi)

Langkah selanjutnya yaitu penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan ini mungkin akan menjawab rumusan masalah yang telah dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena telah disebutkan bahwa masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada di lapangan.

Demikian prosedur yang dilakukan dalam penelitian ini. Dengan melalui tahapan-tahapan ini, diharapkan penelitian ini dapat diperoleh data yang memenuhi kriteria penelitian dan data yang diperoleh dapat dipercaya dan dipertanggungjawabkan kebenarannya.

## **H. Lokasi dan Subjek Penelitian**

### **1. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian ini adalah Pengurus Wilayah Gerakan Pemuda Ansor Jawa Barat. Alasan pengambilan lokasi penelitian tersebut adalah GP Ansor merupakan salah satu organisasi kepemudaan yang memiliki peran penting dalam

kehidupan politik Indonesia semenjak prakemerdekaan Indonesia. GP Ansor merupakan gerakan kepemudaan yang berlandaskan pada nilai-nilai Islam yang berafiliasi dengan Nahdatul Ulama. Diketahui, salah satu organisasi besar yang berhaluan Islam ini memiliki komitmen untuk berpegang teguh pada Pancasila sebagai dasar negara karena selaras dengan nilai-nilai Islam sehingga tidak memaksakan Islam menjadi dasar negara Indonesia. Hal ini memberikan peluang besar terhadap peneliti untuk meneliti tentang penyeenggaraan pendidikan politik dalam membentuk karakter kepemimpinan lintas budaya pada generasi muda demi mewujudkan budaya politik Pancasila.

## 2. Subjek Penelitian

Adapun yang menjadi subjek penelitian ini meliputi :

- a. Ketua PW GP Ansor Jawa Barat.
- b. Pengurus harian organisasi.

### I. Agenda Penelitian

**Tabel 1.1**  
**Agenda Penelitian**

	November	Desember	Januari	Februari	Maret	April
<b>Proposal</b>	√					
<b>Ujian Proposal</b>		√				
<b>BAB I</b>		√				
<b>BAB II</b>		√	√			
<b>BAB III</b>		√	√			
<b>Penelitian</b>		√	√	√		
<b>BAB IV</b>			√	√		
<b>BAB V</b>			√	√		
<b>Sidang I</b>					√	
<b>Sidang II</b>						√